

PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Dewa Made Suriawan¹, Saptala Mandala²

Abstrak: Peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tingkat kriminalitas merupakan hal menarik untuk diteliti. Penelitian ini meneliti peranan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tingkat kriminalitas di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Peranan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten Buleleng dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tingkat kriminalitas di kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Peran tidak langsung berupa upaya dalam bentuk program meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran langsung berupa menyediakan sarana prasarana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sehingga tingkat kriminalitas bisa dikurangi.

Kata-kata kunci: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, laju pertumbuhan penduduk, kriminalitas.

PENDAHULUAN

Dalam Sosiologi, “penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu”. Seiring dengan perkembangan zaman, penduduk di seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. Tidak bisa di pungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu pesat dan tidak dapat di-hindari, tingkat kompleksitas penduduk Indonesia akan semakin tinggi pula, yang berdampak pada tingkat

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

kejahatan yang tinggi pula. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan berbagai solusi serta berbagai semboyan pengurangan kelahiran penduduk telah di tawarkan kepada masyarakat, namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa. Untuk Propinsi Bali jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 3.890.757 jiwa. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari sensus penduduk tahun 2000 mencapai 3.146.999 jiwa, sensus penduduk tahun 1990 mencapai 2.777.356 jiwa, sensus penduduk tahun 1980 mencapai 2.469.724 jiwa.

“Penduduk kabupaten Buleleng pada tahun 2010 mencapai 624.125 jiwa dengan jumlah laki-laki 311.394 jiwa dan jumlah perempuan 312.731 jiwa” (BPS Provinsi Bali”,<http://www.bali.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 30 April 2015). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk SP2010 BPS Buleleng, “total jumlah penduduk kabupaten Buleleng pada tahun 2011 mencapai 637.038 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 641.135 jiwa” (Statistik Kabupaten Buleleng 2013, <http://www.bulelengkab.bps.go.id> Diakses pada tanggal 30 April 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Propinsi Bali khususnya di kabupaten Buleleng sangat pesat.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu Negara.

Salah satu dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk yang saat ini paling mengkhawatirkan adalah makin meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang cukup hanya akan menimbulkan masalah kriminalitas. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa saja beralih menjadi kriminal. Sebagai contoh, di kota-kota besar, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka terpaksa

mencari nafkah dengan menjadi seorang kriminal seperti pencopet, perampok, dan sebagainya.

Menurut Kapolres Buleleng selama ini “kabupaten Buleleng menduduki peringkat kedua untuk angka kriminalitas di propinsi Bali”. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS tercatat bahwa dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali terdapat tiga kabupaten yang mengalami kenaikan jumlah tindak pidana cukup tinggi pada periode tahun 2011-2012. Salah satunya adalah kabupaten Buleleng. Adanya peningkatan tindak kriminalitas di kabupaten Buleleng juga dapat dilihat dari data Polda Bali yang mencatat bahwa pada tahun 2011 terjadi 1.158 tindak pidana, sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan tindak pidana menjadi 1.315 (BPS Provinsi Bali, 2012: 13).

Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah agar masyarakat tidak mengalami hal-hal buruk yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah mengoptimalkan peranan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan guna menekan laju pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tingkat kriminalitas khususnya di kabupaten Buleleng.

PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BULELENG

Untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk, pemerintah pusat sebagai penanggung jawab berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan masalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan mengenai masalah kependudukan, Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dimana pada Pasal 20 yang berbunyi :

“Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”.

Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilaksanakan untuk membantu calon pasangan suami istri yang ada dalam masyarakat dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia ideal perkawinan
- b. Usia ideal melahirkan
- c. Jumlah ideal anak
- d. Jarak ideal kelahiran anak
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi

Selain undang – undang yang telah disebutkan diatas, pemerintah (Presiden) juga mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada Pepres ini di sebutkan pula tugas, fungsi serta wewenang dari BKKBN itu sendiri. Seperti yang terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi: BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Hal diatas menunjukkan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Salah satu program pemerintah pusat yang sering kita jumpai atau temukan diberbagai media – media baik pada media elektronik maupun cetak yaitu “Dua Anak Cukup”, kata ini juga menjadi slogan dari BKKBN.

Permasalahan peningkatan laju pertumbuhan penduduk tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di kabupaten Buleleng memiliki dampak negatif. Salah satu dampak yang sangat memprihatinkan adalah meningkatnya tindak kriminalitas di kabupaten Buleleng. Hal ini diperkuat dengan adanya data dari BPS kabupaten Buleleng yang menyebutkan bahwa dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali terdapat tiga kabupaten yang mengalami kenaikan jumlah tindak pidana cukup tinggi pada periode tahun 2011-2012, salah satunya adalah kabupaten Buleleng.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Buleleng adalah dengan mengoptimalkan peranan BKBPP kabupaten Buleleng dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Guna memudahkan atau melancarkan pelaksanaan program kerja yang telah dibuat, Badan Keluarga Berencana membentuk petugas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Petugas ini biasa disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), PLKB ini memiliki tugas yaitu melaksanakan program kerja KB di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan ada empat kegiatan pokok yang dijalankan BKBPP kabupaten Buleleng untuk menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Ketut Wirawan, Bidang KB dan KS pada Dinas BKBPP Kabupaten Buleleng, dilakukan tanggal 14 Juni 2015):

1. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

Untuk dapat menyukseskan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat, telah dilaksanakan berbagai upaya nyata dari BKBPP Kabupaten Buleleng. Adapun upaya tersebut diantaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) sampai ke pedesaan. Upaya ini dilaksanakan supaya masyarakat mengetahui dan memahami arti pentingnya program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Diharapkan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan pola pikir masyarakat agar turut serta secara aktif dalam mensukseskan program Keluarga Berencana (KB);
- b. Memberikan pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan KB, dengan memberikan pelayanan KB gratis kepada peserta KB IUD, Implant dan MOP. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB melalui sarana mobilitas sehingga daya jangkauan

pelayanan KB untuk pemenuhan gerakan keluarga berencana dapat terlayani sampai ke tingkat bawah;

- c. Mengadakan pelatihan kepada petugas teknis/bidan/dokter yang bertugas memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas lapangan sehingga dapat memberikan pelayanan KB yang maksimal kepada masyarakat ;
- d. Memberikan reward kepada peserta Metode Operasi Pria (MOP)/vasektomi, dengan harapan agar jumlah peserta MOP menjadi meningkat;
- e. Memberikan sosialisasi MOP (vasektomi) kepada para suami sehingga mereka dapat mengetahui apa itu MOP, syarat peserta melakukan MOP dan keuntungan dari MOP. Dengan sosialisasi ini diharapkan peserta MOP meningkat.

2. Program Kesehatan Remaja

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkerluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.

Upaya nyata yang dilakukan oleh BKBPP kabupaten Buleleng adalah berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS.

3. Program Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas

Program ini bertujuan untuk membina kemandirian masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB/KR, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh institusi masyarakat.

4. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Era globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat serta perubahan tentang aturan-aturan tentang kehidupan. Perubahan tersebut diantaranya pola hidup sederhana menjadi konsumtif, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang dulu erat menjadi

longgar, kehidupan yang mementingkan materi dan lain sebagainya. Akibat adanya perubahan tata nilai, serta belum pulihnya ekonomi menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rentan sehingga kesejahteraan keluarga menjadi menurun.

Secara umum program ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga agar mempunyai keuletan dan ketangguhan fisik material, psikis mental spiritual agar dapat mengembangkan diri dan keluarganya dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang tangguh ada empat pokok kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Bina Keluarga Balita (BKB)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak secara holistik dan komprehensif, baik aspek fisik, kecerdasan, emosional maupun social spiritual melalui interaksi orang tua dengan anak. Secara spesifik BKB bertujuan mengenal pertumbuhan dan perkembangan anak, melakukan stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang anak sesuai usia dan perkembangan, merawat, mengasuh dan mendidik anak balita secara baik, dan menjadi teladan dan model yang dapat ditiru oleh anaknya.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan KBKPP kabupaten Buleleng adalah dengan menyiapkan alat permainan edukatif bagi anak. Permainan edukatif ini diberikan kepada keluarga yang memiliki balita melalui kader.

b. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Remaja merupakan tahapan kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam proses perkembangan sejak lahir hingga akhir hayat. Pada masa ini akan banyak terjadi perubahan baik fisik, mental, emosi yang cepat. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah berkaitan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Ketidaksiapan para remaja dalam menghadapi perubahan akan menimbulkan berbagai perilaku yang

menyimpang, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kehamilan usia muda. Sehingga pada masa ini diperlukan perhatian dan pembinaan dari masyarakat, sekolah dan keluarga.

Upaya nyata yang dilakukan BKBPP Kabupaten Buleleng adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan narkoba ke sekolah-sekolah.

c. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Menjadi lansia merupakan proses dalam kehidupan yang secara alami akan mengalami kemunduran fisik dan mental. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan adanya upaya agar lansia tetap mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Upaya yang sudah dilakukan oleh BKBPP kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan fisik bagi lanjut usia
2. Pembinaan psikologis bagi lanjut usia
3. Pembinaan mental spiritual bagi lanjut usia
4. Pembinaan sosial kemasyarakatan bagi lanjut usia
5. Pembinaan pengembangan potensi bagi lanjut usia
6. Kesehatan reproduksi

d. Bina Lingkungan Keluarga (BLK)

Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya dengan meningkatkan ketahanan fisik serta mental spiritual, tetapi perlu didukung dengan pengembangan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Sasaran program ini adalah daerah-daerah kumuh atau daerah memiliki keluarga pra sejahtera dan KS-I.

Upaya yang dilakukan oleh BKBPP kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Gotong-royong yang diikuti oleh seluruh anggota BLK, yang dilaksanakan setiap minggu akhir bulan
2. Pemeliharaan dan pembersihan lingkungan disepanjang jalan utama kompleks setiap sore oleh ibu-ibu anggota BLK

3. Setiap keluarga diwajibkan menanam tanaman obat keluarga sebanyak 10 jenis, pengelolahan sampah, membudayakan hidup bersih hijau dan sehat
4. Ikut serta dalam kegiatan di luar lingkungan komplek (pembersihan makam, pembersihan jalan dan saluran air)

Program pemberdayaan keluarga bertujuan untuk meningkatkan minat, semangat dan ketrampilan keluarga dalam usaha ekonomis produktif sehingga mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada untuk mendapatkan pendapatan keluarga. Upaya yang dilakukan BKBPP kabupaten Buleleng adalah memberikan bantuan dana kepada keluarga miskin melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). UPPKS merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif. Dengan adanya UPPKS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan, baik dari keluarga peserta KB yang bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya.

Berdasarkan laporan BKBPP Kabupaten Buleleng, capaian program pelayanan KB sampai dengan bulan Juni 2013, sudah terlayani sebanyak 7.613 akseptor, terbagi menjadi 3.343 akseptor melalui jalur pemerintah dan 4.270 akseptor melalui jalur swasta. Sedangkan pada tahun 2014 capaian program pelayanan KB sampai dengan Nopember 2014 sudah terlayani sebanyak 112.527 akseptor, terbagi menjadi 41.714 akseptor melalui jalur pemerintah dan 70.813 akseptor melalui jalur swasta.

Data ini menunjukkan adanya peningkatan peserta KB aktif mengalami peningkatan yang lumayan tinggi. Peningkatan peserta KB aktif ini secara langsung akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penduduk di kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk yang tercatat di kabupaten Buleleng tahun

2012 adalah 641.135 jiwa, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 638.300 jiwa dengan jumlah laki-laki 318.000 dan jumlah perempuan 320.300 jiwa.

Penurunan jumlah penduduk kabupaten Buleleng pada tahun 2013 mengakibatkan jumlah tindak kriminalitas di kabupaten Buleleng mengalami penurunan juga. Penurunan jumlah tindak pidana dapat dilihat dari data polda bali yang mencatat bahwa pada tahun 2012 terjadi 1.315 kasus tindak pidana, mengalami penurunan 927 kasus tindak pidana pada tahun 2013. Menurut Kasubag Humas Polres Buleleng, hal ini membuktikan bahwa jumlah kasus pidana atau tindak kriminalitas sejalan dengan kuantitas penduduk. Artinya apabila jumlah penduduk relatif kecil maka jumlah tindak pidana yang terjadi juga relatif kecil, begitu pula sebaliknya.

KENDALA YANG DIHADAPI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa staff di BKBPP Kabupaten Buleleng, BKBPP kabupaten Buleleng dalam peranannya menekan laju pertumbuhan penduduk tentu saja mengalami kendala-kendala. Kendala-kendalanya adalah sebagai berikut.

1. Saat ini peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) masih minim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga ada kaitannya dengan jumlah petugas yang hanya sedikit. Satu orang PLKB satu harus handle 3-4 desa dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan bahkan ribuan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. Tempat penyuluhan yang diadakan oleh petugas keluarga berencana tidak ada tempat khusus, hanya pada waktu diadakan bersamaan dengan kegiatan Posyandu dan dari rumah ke rumah (Wawancara dengan Ida Putu Suarmika, Sub Bagian Data dan Informasi BKBPP Kabupaten Buleleng, dilakukan tanggal 14 Juni 2015).

3. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah untuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng, sehingga program-program Keluarga Berencana belum optimal terlaksana di lapangan.
4. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengikuti Program Keluarga Berencana. Masyarakat masih ada yang beranggapan banyak anak banyak rezeki.
5. Masih banyaknya penduduk pendatang yang berasal dari luar pulau Bali. Penduduk pendatang tersebut mengadu nasib ke Bali khususnya ke kabupaten Buleleng. Pekerjaan dari penduduk pendatang rata-rata tidak ada yang memenuhi kualitas hidup, mereka hidup dengan bekerja sebagai pencari barang bekas, penjual koran, dan penduduk pendatang ini sebagian besar hidup di daerah pesisir pantai yang dimana tingkat hunian mereka tidak layak untuk ditempati. Pola hidup dari penduduk pendatang ini kurang bersih, mereka membuang sampah bukan pada tempatnya sehingga lingkungan di sekitar mereka terlihat kumuh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. BKBPP kabupaten Buleleng memiliki peranan yang sangat penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang sejalan dengan tindak kriminalitas. Apabila jumlah penduduk sedikit, maka kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas yang terjadi juga relatif kecil. Begitu pula sebaliknya apabila jumlah penduduk banyak, maka kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas menjadi meningkat.
2. Dalam pelaksanaan peranannya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk BKBPP kabupaten Buleleng masih mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya terbatasnya jumlah PLKB, terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya anggaran dari pemerintah daerah untuk BKBPP kabupaten Buleleng, masyarakat masih menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, serta masih banyaknya penduduk pendatang dari luar Bali yang mengadu nasib di kabupaten Buleleng.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat menyediakan anggaran dana yang memadai sehingga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten Buleleng dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan programnya.
2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Buleleng diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Buleleng diharapkan agar lebih mengoptimalkan peranannya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga tindak kriminalitas dapat dikurangi.
4. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program Keluarga Berencana.
5. Penduduk pendatang yang akan mengadu nasib di wilayah kabupaten Buleleng agar memiliki pekerjaan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. *Buku Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS*. Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2014.
- BKBPP Kabupaten Buleleng. 2013. *Laporan Bulanan 2013 BKBPP Kabupaten Buleleng*.
- BKBPP Kabupaten Buleleng. 2014. *Laporan Analisa dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program KB-PP Kabupaten Buleleng tahun 2014*. BKBPP Kabupaten Buleleng.
- BPS Provinsi Bali. 2012. *Statistik Kriminal Provinsi Bali 2012*. Denpasar: Arysta Jaya.
- www.babelprov.go.id. Diakses pada tanggal 21 April 2015
- “BPS Provinsi Bali”, <http://www.bali.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 30 April 2015.
- “Buleleng Dalam Angka 2014”, <http://bulelengkab.bps.go.id>. Diakses 17 Juni 2015.
- “Statistik Kabupaten Buleleng 2013”, <http://www.bulelengkab.bps.go.id> Diakses pada tanggal 30 April 2015
- “Statistik Kriminal Provinsi Bali”, <http://bali.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2015.

“Statistik Kriminal Provinsi Bali 2013”,<http://bali.bps.go.id/>. diakses pada tanggal 17 Juni 2015.